

Katalog BPS : 4601003.52

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2014



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Statistics Indonesia Nusa Tenggara Barat Province

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2014

Katalog BPS / BPS Catalogue	: 4601003.52
I S B N	: 978-602-1059-23-4
No. Publikasi / Publication Number	: 52520.1502
Ukuran Buku / Book Size	: 28 x 21 cm
Jumlah Halaman / Total Pages	: 45
Naskah / Manuscript	: Bidang Statistik Sosial <i>Social Statistics Division</i>
Gambar Kulit / Cover Design	: Bidang Statistik Sosial <i>Social Statistics Division</i>
Diterbitkan Oleh / Published By	: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Boleh Dikutip Dengan Menyebut Sumbernya

My be cited with reference to the source

Kata Pengantar

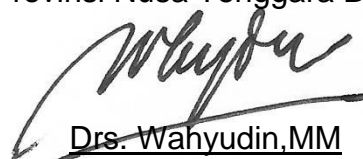
Dinamika politik di Indonesia berkembang sangat cepat, tidak ketinggalan juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini tercermin pada pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara, pemberian kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan dalam kinerja lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak politik rakyat, memberikan kebebasan sipil dan memiliki lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya adalah Pemerintahan yang memiliki ketahanan terhadap guncangan politik baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, Statistik Politik sangat diperlukan untuk mengetahui gambaran keadaan politik dan kegiatan politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Publikasi ini juga menyajikan Statistik Keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Informasi keamanan suatu wilayah sangat diperlukan, baik untuk pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Penyusunan kebijakan program pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan informasi yang ada. Pihak swasta dalam melakukan investasi ke suatu wilayah juga mempertimbangkan situasi keamanannya. Bagi masyarakat, informasi keamanan sangat bermanfaat untuk melakukan antisipasi keamanan dalam lingkungannya. Sajian ini juga diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum pengguna data khususnya keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan sajian data ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perencanaan pembangunan politik dan keamanan di masa mendatang. Bagi masyarakat, sajian data ini diharapkan bermanfaat untuk dapat lebih memahami situasi politik dan keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Data tersebut dikumpulkan oleh BPS dan berbagai instansi yang terkait. Untuk itu, terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan publikasi ini. Kami sangat menyadari bahwa data yang disajikan masih memiliki kelemahan dan kekuranglengkapan. Untuk itu berbagai masukan dan kritik sangat kami hargai guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Mataram, Agustus 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Drs. Wahyudin, MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II METODOLOGI	
2.1. Sumber Data	5
2.2. Konsep dan Definisi	5
BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	10
BAB IV STATISTIK POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	
Pemilukada (Gubernur/Wakil Gubernur) Provinsi NTB Tahun 2013	13
Pemilu Legislatif Tahun 2014.....	19
Pemilu Presiden Tahun 2014	31
BAB V STATISTIK KEAMANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	36

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 3.1 :	Jumlah Kecamatan, dan Desa/kelurahan Di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota, Luas Wilayah, rata-rata jiwa per RT dan kepadatan Tahun 2014	10
Tabel 4.1 :	Hasil Rekapitulasi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB Tahun 2013	18
Tabel 4.2 :	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi NTB	21
Tabel 4.3 :	Partisipasi pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi NTB	22
Tabel 4.4 :	Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat Tahun 2014	25
Tabel 4.5 :	Perolehan Suara Sah Anggota DPD Nusa Tenggara Barat Tahun 2014	25
Tabel 4.6 :	Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat	26
Tabel 4.7 :	Perolehan Kursi Partai Politik masing-masing Dapil Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2014	28
Tabel 4.8 :	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Partrai Politik Tahun 2014	31
Tabel 4.9 :	Rekapitulasi Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Prov. NTB	33
Tabel 4.10 :	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi NTB	34
Tabel 5.1:	Jumlah Kasus 11 Jenis Tindak Pidana Pilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Jam Kejadian Tahun 2014	39

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Hal
Gambar 4.1	Hasil Pemilihan Kepala Daerah NTB Tahun 2013	17
Gambar 4.2	Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat	23
Gambar 5.1.	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) menurut Kepolisian Daerah Tahun 2012-2014	37
Gambar 5.2 .	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) menurut Kepolisian Daerah Tahun 2012-2014	38
Gambar 5.3.	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) menurut Kepolisian Daerah Tahun 2012-2014	38
Gambar 5.4.	Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2014	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai perubahan dalam *real* politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali.

Konstitusi yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu UUD 1945 hasil Amandemen (Perubahan) berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen (perubahan). Pengaruh dari adanya amandemen tersebut sistem ketatanegaraan RI sebagai berikut.:

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (pasal 1 ayat 2).
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU (pasal 2 ayat 1).
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah / menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1).
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melantik Presiden dan Wakil Presiden (pasal 3 ayat 1).
5. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A ayat 1).
6. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7).
7. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD (pasal 22E ayat 2).
8. Adanya keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pada Tahun 2001 setelah melalui beberapa penggunaan hak DPR, MPR memutuskan untuk melakukan pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Di samping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk muncul sehingga membuat jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya konstan berjumlah tiga, bertambah hingga 48 partai pada Pemilu Tahun 1999, dan terus berubah pada Pemilu-Pemilu selanjutnya. Banyaknya jumlah partai politik yang ada di parlemen dianggap cukup menyita energi pemerintah untuk permasalahan politik sehingga berdampak pada kinerja. Implikasinya, pada Pemilu 2009 terdapat gagasan untuk membatasi jumlah Partai Politik di Parlemen dengan memberlakukan *parliamentary treshold* (PT). Ketentuan PT pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak 2,5% dan pada Pemilu 2014 bertambah menjadi 3,5 %..

Dinamika politik juga terjadi di Daerah Nusa Tenggara Barat. Deretan kegiatan politik di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah terjadi. Keadaan terakhir ajang politik di daerah Nusa Tenggara Barat adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013, pesta demokrasi Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 dan Pemilihan Umum Presiden/wakil presiden tahun 2014. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbagai fenomena politik yang terjadi dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan primer yang harus terpenuhi, seperti Sandang, pangan dan papan. Selain itu juga, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder, seperti kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan terutama rasa aman. Rasa aman sangat mendukung dalam mengaktualisasikan diri dalam berbagai hal. Dengan rasa aman, berbagai kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Ini ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan primer semata, namun juga kebutuhan sosialnya, termasuk kebutuhan akan rasa aman.

Selain merupakan kebutuhan sosial, rasa aman (*security*) juga merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman pada dasarnya merupakan variabel yang tidak terukur karena mencakup aspek dan dimensi yang sangat luas, termasuk aspek dan dimensi politik, sosial dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*) Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2015 ini adalah untuk menghimpun dan menampilkan data statistik politik dan keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkala yang dapat dibandingkan antar waktu.

1.3 Ruang Lingkup

Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 mencakup data-data yang terkait dengan politik dan keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 membicarakan metodologi yang membahas sumber data, dan konsep dan definisi. Bab 3 mengulas mengenai gambaran umum daerah Nusa Tenggara Barat. Bab 4 tentang statistik politik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mengulas perjalanan pesta demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari bahasan tentang Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur 2013, Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Bab 5 tentang statistik keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mengulas mengenai jumlah kejadian kejahatan dalam tiga tahun terakhir.

BAB II METODOLOGI

Bab kedua ini membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Konsep dan definisi diperlukan pula untuk memberikan pengertian yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

2.1 Sumber Data

Data publikasi Statistik Politik dan Keamanan ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Sekretariat DPRD serta Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2015, diperlukan pembatasan akan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan.

Calon Perseorangan adalah seorang yang menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa melalui partai politik. Calon independen mulai dikenal melalui UU No. 12/2008 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Calon Legislatif (Caleg) adalah kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Calon Presiden/ Wakil Presiden adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden (UU No.42/2008).

Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pembagian wilayah pada Pemilu legislatif. Pada setiap Dapil dialokasikan sejumlah kursi tertentu yang akan diperebutkan oleh peserta pemilu.

Daftar Calon Tetap (DCT) adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada Pemilu legislatif tingkat Pusat, daerah, dan DPD.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilu yang berkedudukan sebagai anggota MPR. Anggota DPD berjumlah masing-masing empat orang pada setiap provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32/2004).

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua; konvensional seperti memilih dalam Pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah serta DPRD (UU No.32/2004).

Pemekaran Daerah adalah pembentukan wilayah administratif pemerintahan baru dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.

Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang terdiri dari presiden, kabinet, dan lembaga-lembaga pembantu presiden.

Pemilih adalah warga negara Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU No.10/2008).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.22/2007).

Penduduk adalah warga negara Provinsi Nusa Tenggara Barat atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan kandidat presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah :

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

Klasifikasi pelaku kejahatan menurut umur :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan.

BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Posisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terletak pada 115⁰46' – 119⁰5' Bujur Timur dan 8⁰10' – 9⁰5' Lintang Selatan. NTB merupakan salah satu provinsi dan berada di kawasan Timur Indonesia, yang terletak diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTB dikenal sebagai daerah Bumi Gora (Gogo-Rancah) artinya bumi yang dapat ditanami padi baik di daerah kering maupun di daerah basah.

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan, dan Desa/kelurahan Di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota, Luas Wilayah, rata-rata jiwa per RT dan kepadatan Tahun 2014

Kab/Kota	Luas Wilayah (KM2)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lombok Barat	1.053,92	10	122	620.412
Lombok Tengah	1.208,40	12	139	881.686
Lombok Timur	1.605,55	20	254	1.130.365
Sumbawa	6.643,98	24	166	423.029
Dompu	2324,6	8	81	223.678
Bima	4.389,40	18	198	447.286
Sumbawa Barat	1.849,02	8	65	118.608
Lombok Utara	809,53	5	33	205.064
Kota Mataram	61,30	6	50	419.641
Kota Bima	222,25	5	38	146.308
NTB	20.153,15	116	1.146	4.616.077

Sumber : BPS NTB

Letak NTB yang berbatasan langsung dengan daerah tujuan wisata dunia yaitu Provinsi Bali, sedikit banyak memberi dampak terhadap kegiatan pariwisata di NTB. Banyak kawasan wisata alam di Provinsi NTB yang sangat bagus pemandangan alam dan pantainya. Seperti : Gunung Rinjani, Gunung

Tambora, Pantai Senggigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pantai Lakey dan obyek wisata lainnya.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,15 km², terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Luas Pulau Sumbawa mencapai tiga kali luas Pulau Lombok. Sebanyak 280 pulau terdapat di Provinsi NTB dan baru 32 pulau yang berpenghuni. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan 116 kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa mempunyai jumlah kecamatan yang paling banyak, yaitu 24 kecamatan dan Kabupaten yang paling banyak mempunyai jumlah desa/kelurahan, yaitu Kabupaten Lombok Timur sebanyak 254 desa/kelurahan.

Persebaran penduduk di NTB tampak tidak merata baik antar pulau maupun kabupaten/kota. Penduduk lebih banyak bertempat tinggal di Pulau Lombok dibandingkan Pulau Sumbawa. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.130.365 jiwa dan yang terendah adalah penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar 118.608 jiwa. Dengan luas wilayah yang lebih sempit, Pulau Lombok dihuni oleh 3,257 juta jiwa atau sekitar 70,56 persen dari jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat dan pulau Sumbawa yang begitu luasnya hanya dihuni oleh 30 persen dari jumlah penduduk NTB.

IV
STATISTIK POLITIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

<http://ntb.bps.go.id>

PEMILUKADA (GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR) PROVINSI NTB

TAHUN 2013



PILGUB NTB 2013

**PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PADA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
SENIN, 13 MEI 2013**

<p>1</p> <p>H. M. Nur Hafid Gubernur NTB</p> <p>H. M. Nur Hafid Wakil Gubernur NTB</p>	<p>2</p> <p>H. M. Nur Hafid Gubernur NTB</p> <p>H. M. Nur Hafid Wakil Gubernur NTB</p>	<p>3</p> <p>H. M. Nur Hafid Gubernur NTB</p> <p>H. M. Nur Hafid Wakil Gubernur NTB</p>	<p>4</p> <p>H. M. Nur Hafid Gubernur NTB</p> <p>H. M. Nur Hafid Wakil Gubernur NTB</p>
--	--	--	--

A. Sejarah Gubernur NTB

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat, dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menjadi Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR. Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R. Wasita Kusuma digantikan H. Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal

sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinata dan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini, sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan ditargetkan rampung pertengahan 2009.

Bulan Periode tahun 2009 – 2014, Provinsi NTB dipimpin oleh salah satu putra terbaiknya yaitu Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi berpasangan dengan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pasangan ini mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing. Banyak program pembangunan yang diluncurkan, terutama program pengentasan kemiskinan. Prestasi terbaiknya adalah penghargaan penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Pemilihan Umum Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat (Pilkada) Periode Tahun 2013 - 2018

Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2013. Sebelum pelaksanaan Pilkada tersebut terjadi proses persiapan yang panjang. Salah satu prosesnya adalah Diakhir pleno, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), DPT untuk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur periode 2013-2018 sebanyak 3.478.892 jiwa, yang terdiri dari sebanyak 1.691.563 jiwa laki-laki dan 1.787.329 jiwa

perempuan. Rinciannya, pemilih di Kota Mataram sebanyak 294.894 jiwa terdiri dari 143.417 jiwa laki-laki dan 151.477 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Barat sebanyak 456.211 jiwa, terdiri dari 224.832 jiwa laki-laki dan 231.379 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Utara sebanyak 155.468 jiwa, terdiri dari 76.750 jiwa laki-laki dan 78.718 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 699.949 jiwa, terdiri dari 338.116 jiwa laki-laki dan 361.833 jiwa perempuan. Kabupaten Lombok Timur sebanyak 868.743 jiwa, terdiri dari 416.597 jiwa laki-laki dan 452.146 jiwa perempuan. Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 92.403 jiwa, terdiri dari 45.057 jiwa laki-laki dan 47.346 jiwa perempuan. Kabupaten Sumbawa sebanyak 325.855 jiwa, terdiri dari 159.755 jiwa laki-laki dan 166.100 jiwa perempuan. Kabupaten Dompu sebanyak 149.262 jiwa, terdiri dari 73.295 jiwa laki-laki dan 75.967 jiwa perempuan. Kabupaten Bima sebanyak 331.624 jiwa, terdiri dari 163.093 jiwa laki-laki dan 168.531 jiwa perempuan. Pemilih di Kota Bima sebanyak 104.483 jiwa, terdiri dari 50.651 jiwa laki-laki dan 53.832 jiwa perempuan. Sebanyak 3,4 juta lebih pemilih itu akan menyalurkan hak pilihnya pada 8.922 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menyebar di 1.137 desa, 116 kecamatan, 10 kabupaten/kota.

Tahapan selanjutnya adalah pembukaan pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur. Pada pilgub NTB 2013, ada lima bakal calon yang mendaftarkan diri. Salah satu bakal calon yang mendaftar melalui jalur independen, Lalu Ranggalawe dan Ahmad Mukhlis (LARIS). Sedangkan 4 pasangan lainnya didukung oleh partai politik. Pada tanggal 25 Maret 2013, KPU menetapkan 4 pasangan cagub/cawagub untuk pilgub NTB. Pasangan LARIS tidak diloloskan karena tidak memenuhi syarat. Jadi yang bertarung dalam pilgub adalah:

- TGH. M. Zainul Majdi dan Muhammad Amin (TGB-Amin) yang diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra.
- Harun Al Rasyid dan TGH. L. Muhyi Abidin (Harum) yang diusung oleh Partai Hanura, PNBK Indonesia, PPDI, Partai Buruh, PNIM, PDP, PSI, PPNUI, PPN, PPI, PKP, partai Patriot, Partai Merdeka, PMB, PIS, Partra Barnas, Partai kedaulatan dan PKPI.

- DR. K.H. Zulkifli Muhadli dan Prof. DR. H. Muhammad Ichasn (Zul-Ichsan) diusung oleh Partai Bulan Bintang, PKNU, PKPB dan PPPI
- H. Suryadi Jaya Purnama dan Johan Rosihin (SJP-Jo) diusung oleh PKS, PBR dan PPRN.

Gambar 4.1. Hasil Pemilihan Kepala Daerah NTB Tahun 2013



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan KH Muhammad Zainul Majdi-M Amin (TGB-Amin) sebagai pemenang Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Kemenangan pasangan tersebut ditetapkan berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

yang diselenggarakan KPU NTB, Kamis (23/5). “Dari hasil rakapitulasi penghitungan suara KPU NTB menetapkan pasangan nomor urut satu TGB Amin unggul pada Pilgub NTB,” kata Ketua KPU NTB Fauzan Khalid. Dari 2.341.492 jumlah suara yang sah, TGB-Amin meraih 1.038.638 suara (44,37%), menyusul pasangan Zulkifli Muhadly-Muhammad Ichsan (Zul-Ichsan) dengan 620.611 suara (26,50%), Harun Al Rasyid-H. Lalu Muhyi Abidin 4.98.420 suara (21,28%), dan pasangan Suryadi Jaya Purnama-Johan Rosihan meraih 183.823 suara (7,85%). Dengan komposisi perolehan suara itu, KPU NTB menetapkan pasangan TGB-Amin sebagai calon terpilih dalam Pilgub NTB untuk periode 2013/2018.

Tabel : 4.1 Hasil Rekapitulasi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur NTB Tahun 2013

Kandidat	Partai	Suara	%
TGB M. Zainul Majdi - Muhammad Amin	<u>Demokrat</u> , <u>Partai Golkar</u> , <u>PDIP</u> , <u>PPP</u> , <u>PAN</u> , <u>Partai Gerindra</u> , <u>PKB</u>	1.038.638	44,37 %
Suryadi Jaya Purnama - Johan Rosihan	<u>PKS</u> , <u>PBR</u> , <u>PPRN</u>	183.823	7,85 %
Harun Al Rasyid - Lalu Abdul Muhyi Abidin	<u>Partai Hanura</u>	498.420	21,28 %
Zulkifli Muhadli - Muhammad Ichsan	<u>PBB</u> , <u>PKNU</u> , <u>PKPB</u> , <u>PPPI</u>	620.611	36,50%
Tidak sah/golput		109.594	
Total		2.341.492	100 %
Pemilih terdaftar		3.478.441	
Sumber: KPUD NTB			

PEMILU LEGISLATIF 2014



C. Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara maka bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat maka pemerintah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi.

Sebagai perwujudan bahwa pemerintah telah menjamin hak-hak asasi warga, termasuk Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dalam terselenggaranya Pemilu Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014. Dimana masyarakat Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 April 2014 telah menentukan pilihannya atau memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, baik pusat maupun daerah.

Persiapan proses Pileg 2014 di Nusa Tenggara Barat cukup panjang. Dari perbaikan daftar pemilih Pileg, pendaftaran partai politik dan pendaftaran calon legislatif. Tahapan demi tahapan telah dilaksanakan oleh lembaga pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nusa Tenggara Barat.

Hasil dari perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi NTB yang ditetapkan oleh KPU RI dengan Berita Acara Nomor: 16/BA/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tingkat Provinsi NTB
(ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2014)

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	KOTA MATARAM	997	140.038	148.626	288.664
2	LOMBOK BARAT	1,707	231.860	238.963	470.823
3	LOMBOK UTARA	518	79.198	80.916	160.114
4	LOMBOK TENGAH	2,232	349.607	366.040	715.647
5	LOMBOK TIMUR	3,077	376.120	433.519	809.639
6	SUMBAWA BARAT	332	44.314	44.540	88.854
7	SUMBAWA	1,158	161.414	166.840	328.254
8	DOMPU	577	75.803	78.240	154.043
9	BIMA	1,069	172.225	178.213	350.438
10	KOTA BIMA	353	49.290	52.485	101.775
TOTAL		12.020	1.679.869	1.788.382	3.468.251

Sumber: Dokumen Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Prov.NTB, 2014

Jumlah pemilih pada Pileg 2014 di Nusa Tenggara Barat berjumlah 3.468.251 orang yang tersebar di 12.020 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, pemilih Pileg 2014 perempuan lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio jenis kelamin pileg 2014 sebesar 93,93, artinya dari 100 pemilih perempuan terdapat sekitar 94 pemilih laki-laki.

Partisipasi Pemilih

Implementasi sosialisasi yang digambarkan di atas, telah memberi kontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD 77,32 %. Adapun gambaran partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif 2014 masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada table.

Tabel 4.3 : Partisipasi pemilih pada pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Provinsi NTB

NO	Kab/Kota	Jumlah Pemilih terdaftar (DPT, DPTB, DPK, DPKTb)	Pengguna hak pilih	Partisipasi (%)
1	Kota mataram	299.678	218.057	77,76
2	Kab.Lombok Barat	486.004	373.027	76,75
3	Kab.Lombok Utara	162.882	128.692	79,01
4	Kab.Lombok Tengah	728.968	548.816	75,29
5	Kab.Lombok Timur	838.448	655.681	78,20
6	Kab.Sumbawa Barat	92.569	76.058	82,16
7	Kab.Sumbawa	334.785	264.178	78,91
8	Kab.Dompu	159.621	133.583	83,69
9	Kab.Bima	360.310	274.348	76,14
10	Kota Bima	106.275	87.642	82,47
Jumlah		3.569.540	2.760.082	77,32

Sumber : Dokumen Subag teknis dan Hubmas KPU NTB, 2014

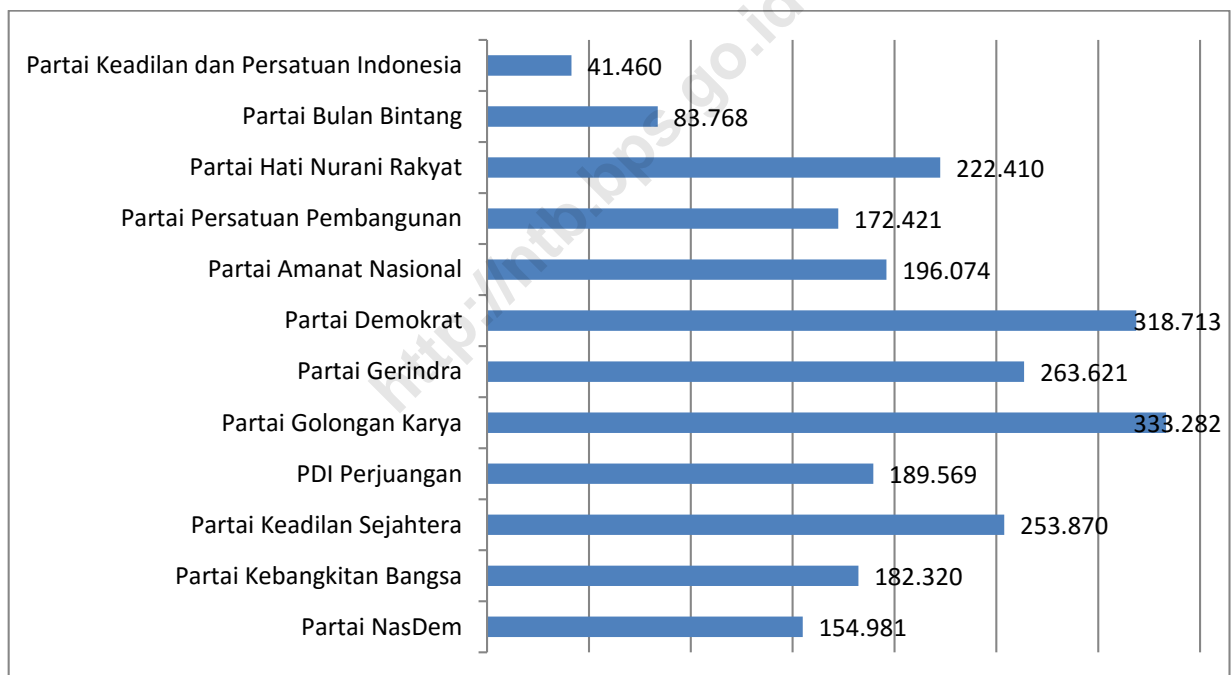
Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka partisipasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 83,69 %. Sedangkan angka partisipasi terendah ada di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 75,25 %. Terlihat pula secara geografis, kabupaten/kota yang berada di pulau Sumbawa (Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima) memiliki angka partisipasi yang lebih tinggi dibanding kabupaten/kota yang ada di pulau Lombok (Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur). Hanya satu

kabupaten di pulau Sumbawa yang memiliki angka partisipasi rendah yakni kabupaten Bima 76,14 %, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lombok Tengah 75,29 %.

- **Pemilu Anggota DPR RI Tahun 2014**

Perolehan Suara Sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti pada gambar 4.2. Partai Golongan Karya paling banyak memperoleh suara, yaitu sebanyak 333.282 (13,81%) suara, disusul Partai Demokrat sebanyak 318.713 (13,21%) suara. Perolehan suara sah Partai Politik Pileg 2014 anggota DPR RI selengkapnya seperti gambar 4.2.

Gambar 4.2 Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Bagian Teknis Pemilu KPU NTB 2014

Dapil NTB mendapat jatah 10 kursi DPR RI. Berikut ini data pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di provinsi tersebut:

- Jumlah pemilih: 3.569.539 orang
- Pengguna hak pilih: 2.760.081 orang

- Jumlah suara sah: 2.412.489
- Jumlah suara tidak sah: 347.592
- Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) = 241.249 (2.412.489 suara / 10 kursi)

Proses pembagian kursi dan penetapan caleg terpilih

- Tahap pertama, mencari partai politik yang perolehan suaranya melebihi BPP (241.249 suara). BPP sama dengan 1 kursi.
- Ternyata ada empat partai politik yang memenuhi syarat di atas (lihat tabel), yaitu Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKS. Empat partai ini otomatis memperoleh masing-masing 1 kursi, dan masih memiliki sisa suara, yaitu Golkar 92.033, Demokrat 77.464, Gerindra 22.372, dan PKS 12.621. Sisa suara ini akan digunakan untuk pembagian kursi tahap kedua.
- Tahap kedua, sisa 6 kursi dibagi untuk partai politik sesuai dengan urutan perolehan suara dan / atau sisa suara.
- Peringkat 5-10, yaitu Hanura, PAN, PDIP, PKB, PPP, dan NasDem, masing-masing memperoleh 1 kursi, karena perolehan suaranya melebihi sisa suara Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKS.
- Dengan demikian, 10 kursi terbagi rata untuk semua partai politik kecuali PBB dan PKPI. Setiap partai politik hanya memperoleh 1 kursi di DPR RI.
- Tahap ketiga, mencari caleg dengan perolehan suara tertinggi untuk setiap partai politik yang memperoleh kursi.

Dari proses tersebut, maka terpilih 10 anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019. Dari 10 anggota DP RI Nusa Tenggara Barat, hanya 1 (satu) orang perempuan yang terpilih untuk duduk di DPR RI, yaitu Dra. Hj. ErmalenaMHS. Nama-nama terpilih sebagai anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 : Calon Terpilih Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat Tahun 2014

Rank	Partai Politik	Suara	Caleg Terpilih	Suara
1	Golkar	333.282	H Muhammad Luthfi SE	59.074
2	Demokrat	318.713	HM Syamsul Luthfi	83.638
3	Gerindra	263.621	H Wilgo Zainar	55.192
4	PKS	253.870	H Fahri Hamzah SE	125.083
5	Hanura	222.410	Lalu Gde Syamsul Mujahidin SE	71.211
6	PAN	196.074	H Muhammad Syafrudin ST MM	62.292
7	PDIP	189.569	H Rachmat Hidayat SH	62.987
8	PKB	182.320	Ir Helmy Faishal Zaini	69.542
9	PPP	172.421	Dra Hj Ermalena MHS	49.314
10	Nasdem	154.981	Dr H Kurtubi SE MSp MSc	37.889
11	PBB	83.768	—	—
12	PKPI	41.460	—	—
	Jumlah suara sah	2.412.489		

NB: Muhammad Luthfi, Fahri Hamzah, Muhammad Syafruddin, dan Rachmat Hidayat merupakan calon incumbent.

- **Pemilihan Anggota DPD Nusa Tenggara Barat**

Setelah rekapitulasi penghitungan suara untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diperoleh Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Anggota DPD Dapil Provinsi NTB dalam sertifikat Model DC-1 DPD sebagai berikut:

Tabel 4.5: Perolehan Suara Sah Anggota DPD Nusa Tenggara Barat Tahun 2014

No.	Data Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah	
		Semula	Menjadi
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Anggota DPD	2.257.369	2.256.632
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	502.713	503.450
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	2.760.082	2.760.082

Sumber: Bagian Teknis Pemilu KPU NTB 2014

Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

Tabel 4.6 : Jumlah Suara Sah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 Dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat

No. Urut	Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon
1	A. ZULKARNAEN ARIPIN ABDUL MAJID, S.Ag.	111.593
2	H. ABDUL HARIS, M.Sc, M.M.	79.814
3	H. ABDUL KASIM, S.H.	98.958
4	drh. H. ABDUL SAMAD	87.653
5	ANDI MAPPERUMAH, M.S.	89.469
6	Ir. H. BADRUL MUNIR, M.M.	112.261
7	BAIQ DIYAH RATU GANEFI, S.H.	187.695
8	DJAIDUN HASAN, S.E., M.M.	55.443
9	Prof. Dr. FAROUK MUHAMMAD	152.306
10	HAJI PADLI	95.583
11	HALIMAH TUSA'ADIAH, S.Pd.I.	25.185
12	Ir. ILHAM SABIL	29.429
13	KAHRUL ZAMAN, S.H., M.H.	15.764
14	L. NASRULLAH WIJAYA KUSUMA, S.P., M.H.	27.468
15	TGH. L. NURUL WATHONI S. Pd.I.	42.480
16	H. L. SAHRIAL AKHMADI, S.H.	44.634
17	Drs. LALU AGUS SARJANA	21.654
18	TGH. LALU MALA SAR'I, S.Ag.	71.871
19	Meninggal	
20	Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY	172.375
21	H. LALU WIRATMAJA, S.H.	71.883
22	Ir. H. M. IKHSAN GEMALA PUTRA	16.761
23	Drs. H. M. IKROM	12.226

24	H. M. SUPARJITO, S.Sos.	14.418
25	H. MASYKUR SIMAN	8.524
26	Drs. TGH. MUCHLIS IBRAHIM, M.Si.	61.889
27	MUH. TURMUZI, S.H. M.M.Pd.	19.667
28	H. MUHAIMIN YAHYA, S.Sos.	33.922
29	MUHAMAD MUSANNIP	12.748
30	H. MUHAMMAD, S.H.	23.091
31	MUHAMMAD NASRULLAH, S.Ag.	32.414
32	TGH. MUHARRAR MAHFUZ	129.002
33	NAJAMUDDIN UMAR, S.E.	23.676
34	Hj. ROBIATUL ADAWIYAH, S.E.	129.878
35	RUKMAN, S.E.	19.022
36	Ir. Hj. SRI SUSTINI. NS, M.M.	38.991
37	Dr. SUHARYANTO H. SORO, A.CA., S.Pd. M.Pd.	22.306
38	SUPRATMAN, S.E.	19.259
39	THAMRIN MARDJUN	5.920
40	Ir. TJATUR KUKUH SURJANTO	12.695
41	YANI SAGAROA	26.705
	Jumlah Suara Sah Calon	2.256.632

Dari rekapitulasi perolehan suara seperti di atas, maka anggota DPD Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 adalah 1). Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H 2). Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy 3). Prof. Dr. Farouk Muhammad dan 4). Hj. Robiatul Adawiyah, S.E

- **Pemilihan Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2019**

Sesuai Hasil Penetapan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 masing-masing Daerah Pemilihan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nusa

Tenggara Barat periode tahun 2014-2019 masing-masing Daerah Pemilihan dalam Rapat Pleno yang diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2014 di Hotel Lombok Raya Mataram.

Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor: 767/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-017/2014 Tentang Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi NTB Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.

Perolehan Kursi Partai Politik masing-masing Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Tabel 4.7 : Perolehan Kursi Partai Politik masing-masing Dapil Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2014

No	PARTAI POLITIK	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 1			
1	PDI Perjuangan	Ir. Made Slamet, MM.	12.078
2	Partai Golongan Karya	H. Lalu Darma Setiawan, SH	6.368
3	Partai Gerindra	Drs. H. Abdul Karim, MM.	6.997
4	Partai Demokrat	H. MNS Kasdiono, SH	13.445
5	Partai Persatuan Pembangunan	Drs. H. Muzihir	8.921
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 2			
1	Partai NasDem	H. Lalu Herwanto, SH	6.190
2	Partai Kebangkitan Bangsa	H. Khudari Ibrahim, LC	13.332
3	Partai Keadilan Sejahtera	H. L. Pattimura Farhan, S.Ag	6.476
4	PDI Perjuangan	H. Raden Nuna Abriadi, S.IP	10.047
5	Partai Golongan Karya	H. Umar Said, S. Ag	21.066
6	Partai Golongan Karya	TGH. Muammar Arafat, SH., MH.	17.298
7	Partai Gerindra	Sarifudin, SH.	11.660
8	Partai Demokrat	TGH. Mahalli Fikri	14.924

9	Partai Amanat Nasional	M. Hadi Sulthon, S.Sos.	9.355
10	Partai Persatuan Pembangunan	Dra. Hj. Wartiah, M.Pd.	12.846
11	Partai Hati Nurani Rakyat	H. Suharto, ST., MM	13.538
12	Partai Bulan Bintang	H. Junaidi ARIF, SP	4.745
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 3			
1	Partai NasDem	Hj. Suryahartin, SP. M.AP	9.807
2	Partai Keadilan Sejahtera	H. Abdul Hadi, SE., MM	9.828
3	Partai Golongan Karya	Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH.	10.309
4	Partai Gerindra	Hamja	10.985
5	Partai Demokrat	Drs. H. M. Nasihuddin Badri, M.AP.	9.898
6	Partai Amanat Nasional	Saefuddin Zohri, S.Ag.	7.340
7	Partai Persatuan Pembangunan	Drs. TGH. Hazmi Hamzar, SH.	17.415
8	Partai Hati Nurani Rakyat	H. Rumaksi SJ, SH	16.668
9	Partai Bulan Bintang	H.Machsun Ridwainy, S.Sos, MBA	11.384
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 4			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	M a k m u n, S.Pd.	7.148
2	Partai Keadilan Sejahtera	H. Usmar Iwan Surambian, SE	8.990
3	Partai Golongan Karya	Drs. H. Sahafari Asy'ari	7.438
4	Partai Gerindra	H. M. Sakduddin, SH	5.251
5	Partai Demokrat	Muhammad Guntur Halba.	9.041
6	Partai Bulan Bintang	H. Burhanuddin	13.213
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 5			
1	Partai Keadilan Sejahtera	Johan Rosihan, ST	16.581
2	Pdi Perjuangan	H.M. Husni Djibril, B.Sc.	22.728
3	Partai Golongan Karya	Ir. H. Busrah Hasan, MM	11.567
4	Partai Gerindra	H. Irwan Rahadi, ST	7.408
5	Partai Demokrat	Baijuri Bulkihah, SH.	11.817
6	Partai Amanat Nasional	Burhanuddin Jafar Salam, SH.	10.269
7	Partai Persatuan Pembangunan	Nurdin Ranggabarani, SH., MH.	13.802
8	Partai Hati Nurani Rakyat	Hj. Rahmah HM.	15.885

Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 6			
1	Partai NasDem	Raihan Anwar, SE. M.Si	5.529
2	Partai Kebangkitan Bangsa	HJ. Nurlaela Chaerunisa, SE.	10.338
3	Partai Keadilan Sejahtera	Syamsuddin Majid, SE	10.883
4	PDI Perjuangan	Ahmad Yadiansyah, S.Sos	9.481
5	Partai Golongan Karya	H. Wahidin HM Noer, SE.	12.725
6	Partai Golongan Karya	H. Nurdin, SH.	8.635
7	Partai Gerindra	Mori Hanafi, SE	13.151
8	Partai Demokrat	Misfalah, S.Pd.	16.567
9	Partai Amanat Nasional	Drs. H. Ali Ahmad, SH.	8.256
10	Partai Persatuan Pembangunan	H. Syafriansar, S.Sos.	7.419
11	Partai Hati Nurani Rakyat	Drs. Noerdin H.M JACUB	8.466
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 7			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	TGH. L.G.M. Ali Wirasakti Amir Murni, Lc., MA.	11.225
2	Partai Keadilan Sejahtera	Yek Agil	7.032
3	Partai Golongan Karya	Drs. H. Humaidi	23.470
4	Partai Golongan Karya	Lalu Satriawandi, ST	8.465
5	Partai Gerindra	L. Fathul Bahri, SP.	14.495
6	Partai Demokrat	H.Moh.Rais Ishak, SH	5.917
7	Partai Amanat Nasional	Lalu Teguh Juangsa Putra, ST.	9.934
Daerah Pemilihan : Nusa Tenggara Barat 8			
1	Partai Kebangkitan Bangsa	H. L. Pelita Putra, SH.	8.878
2	PDI Perjuangan	Drs. Ruslan Turmuzi	6.965
3	Partai Golongan Karya	Drs. H. Lalu Wireginawang	11.841
4	Partai Gerindra	H. Lalu Jazuli Azhar, SH., M.Si	10.323
5	Partai Demokrat	Lalu Sudiartawan, SH	14.629
6	Partai Persatuan Pembangunan	Drs. H. M. Adung	6.016
7	Partai Hati Nurani Rakyat	H. Burhanudin, S.Sos.,MM	9.549

Sumber: Bagian Teknis Pemilu KPU NTB 2014

Dari hasil perolehan suara menurut parpol dan dapil maka anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019 maka terpilih sebanyak 65 orang sebagai anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 65 anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut hanya 5 (lima) perempuan yang terpilih. Adapun asal partai, jumlah terbanyak dari Partai Golongan Karya 11 orang, disusul Partai Demokrat dan Gerindra masing-masing 8 (delapan) orang.

TABEL 4.8 : JUMLAH ANGGOTA DPRD PROVINSI MENURUT PARTAI POLITIK TAHUN 2014

Nama Partai Politik	Jumlah Anggota		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Partai NASDEM	2	1	3
PKB	4	1	5
PKS	6	-	6
PDIP	5	-	5
Partai Golkar	10	1	11
Partai GERINDA	8	-	8
Partai Demokrat	8	-	8
PAN	5	-	5
PPP	5	1	6
Partai HANURA	4	1	5
PBB	3	-	3
PKPI	-	-	0
Jumlah	60	5	65

Sumber : Sekretariat Dewan DPRD Provinsi NTB

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Periode 2014-2019

<http://ntb.bps.go.id>

- **Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019**

Tahap persiapan adalah Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Tabel 4.9: Rekapitulasi Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 Prov. NTB

No.	Kabupaten/Kota	Pemilih			Jumlah PPK	Jumlah PPS	Jumlah TPS
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
1.	Kota Mataram	141.913	150.306	292.219	6	50	662
2.	Lombok Barat	233.714	241.314	475.028	10	122	1.180
3.	Lombok Utara	78.750	80.334	159.084	5	33	437
4.	Lombok Tengah	353.126	370.833	723.959	12	139	1.762
5.	Lombok Timur	386.177	446.034	832.211	20	254	2.017
6.	Sumbawa Barat	45.194	45.696	90.890	8	64	194
7.	Sumbawa	162.554	168.471	331.025	24	165	933
8.	Dompu	77.928	80.204	158.132	8	81	458
9.	Kab. Bima	174.923	180.858	355.781	18	191	660
10.	Kota Bima	50.632	53.718	104.350	5	38	249
Jumlah		1.704.911	1.817.768	3.522.679	116	1.137	8.552

Berdasarkan DPT yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi NTB selanjutnya melakukan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Juni 2014 kemudian menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden Tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3.522.679 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1.704.911 jiwa dan perempuan sebanyak 1.817.768 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 8.552, sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 886/BA/V/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana terlihat dalam tabe 4.9.

Tabel : 4.10 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Pasangan Calon		Suara Sah	Suara Tidak Sah
	H. Prabowo Subianto & Ir.H.M. Hatta Rajasa	Ir.H.Joko Widodo & Drs. H. M. Jusuf Kalla		
Kota Mataram	143.741	71.647	215.388	1.455
Lombok Barat	264.566	79.129	343.695	3.435
Lombok Utara	83.339	35.846	119.185	1.667
Lombok Tengah	362.628	129.040	491.668	4.438
Lombok Timur	471.546	155.595	627.141	8.568
Sumbawa Barat	43.934	22.185	66.119	549
Sumbawa	160.055	85.539	245.594	1.651
Dompu	85.635	36.005	121.640	798
Bima	168.840	67.336	236.176	1.622
Kota Bima	59.894	18.916	78.810	398
Jumlah	1.844.178	701.238	2.545.416	24.581
Prosentase	72,45%	27,55%	99,04%	0,96%

Sesuai Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 983/BA/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, Rincian Suara Sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat, seperti tabel 4.10. Di mana calon H. Prabowo

Subianto & Ir.H.M. Hatta Rajasa memperoleh suara yang sangat banyak yaitu mencapai 1.844.178 (72,45 %) suara, sementara itu calon presiden Ir.H.Joko Widodo & Drs. H. M. Jusuf Kalla hanya sebanyak 701.238 (27,55%) suara.

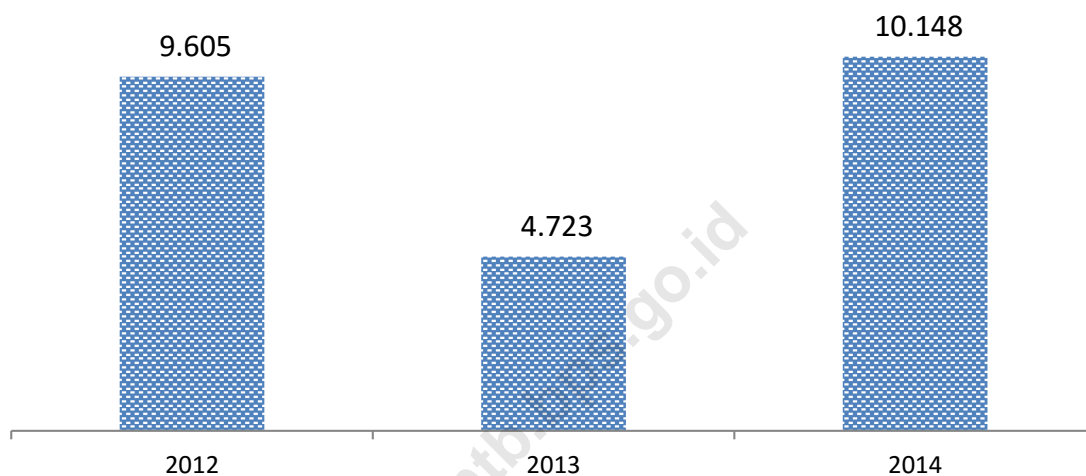
<http://ntb.bps.go.id>

V
STATISTIK KEAMANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

<http://ntb.bps.go.id>

Selama periode tahun 2012–2014, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas yang dilaporkan di Daerah Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan di tahun 2014. Di mana jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 9.605 kasus, menurun menjadi 4.723 kasus pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 10.148 kasus pada tahun 2014. Seperti yang disajikan pada gambar 3.1.

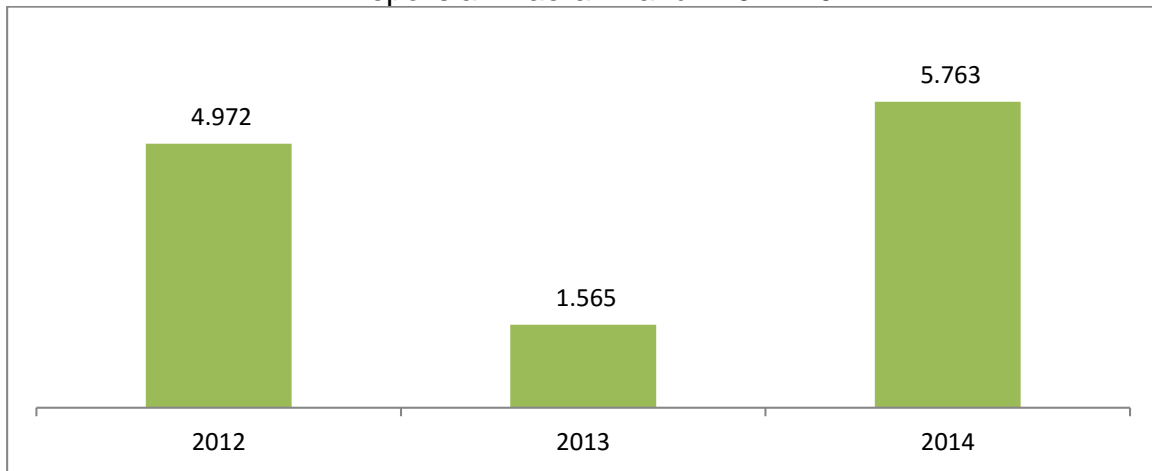
Gambar 5.1. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) menurut Kepolisian Daerah Tahun 2012-2014



Sumber : Polda NTB

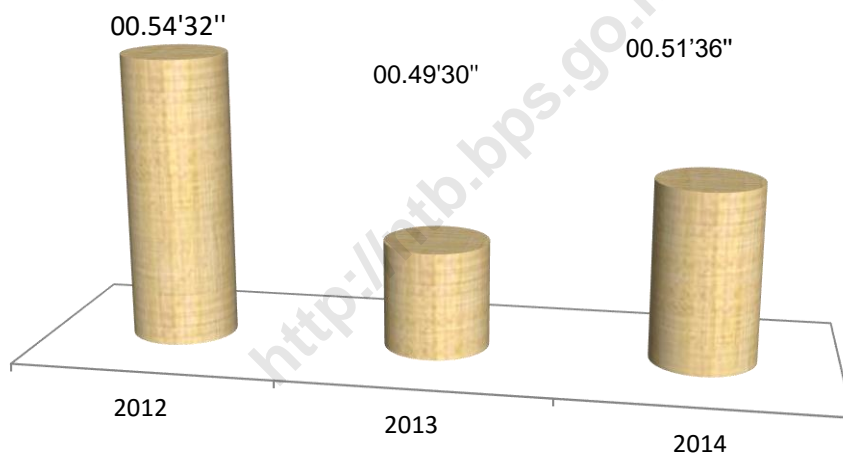
Selama periode tersebut, dari jumlah kejahatan yang dilaporkan belum dapat terungkap atau diselesaikan (*Crime cleared*) seluruhnya. Pada tahun 2012, jumlah kejahatan yang dapat diselesaikan hanya sebanyak 4.972 (51,76%) kasus dan sebanyak 1.565 (33,14%) kasus kejahatan dapat diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2014 kasus kejahatan meningkat tetapi kasus yang dapat diselesaikan meningkat menjadi 5.763 (56,79%) kasus kejahatan yang dapat diselesaikan.

Gambar 5.2 . Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) menurut Kepolisian Daerah Tahun 2012-2014



Sumber : Polda NTB

Gambar 5.3. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (*Crime Clock*) menurut Kepolisian Daerah Tahun 2012-2014



Sumber : Polda NTB

Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode tersebut juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa interval waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) di Daerah Nusa Tenggara Barat berfluktuatif, artinya waktu kejadian kejahatan semakin rapat (sering) dari tahun 2012 ke 2013 dan waktu kejadian kejahatan semakin renggang dari tahun 2013 ke tahun 2014. Pada tahun 2012, interval waktu kejadian kejahatan

00.54'32", pada tahun 2013 semakin memendek selangnya menjadi sebesar 00.49'30", dan pada tahun 2014 kembali bertambah waktunya, yaitu setiap kurang dari satu jam terjadi kejadian kejahatan (00.51'36"), seperti disajikan pada gambar 3.3.

Dari tabel 5.1 menunjukkan kapan terjadi kejadian dari 11 jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan, penganiayaan berat, Pencurian dengan pemberatan, Pencurian dengan kekerasan, Pencurian Kendaraan Bermotor, kebakaran, perjudian, pemerasan, perkosaan, narkoba dan kenakalan remaja. Secara umum, kejadian tindak pidana paling sering terjadi pada selang waktu pukul 18.00 – 20.59 sebanyak 83 kejadian dan pukul 15.00-17.59 sebanyak 72 kejadian. Ada hal yang menarik dari tabel 5.1 terhadap jenis tindak pidana dengan waktu kejadian. Jika diamati dari 11 jenis tindak kejahatan, waktu kejadian pada pukul 15.00-21.00 paling banyak terjadi pencurian bermotor. Sedangkan tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan paling banyak terjadi diantara waktu pukul 21.00-04.00 atau tengah malam sampai subuh.

Tabel 5.1. Jumlah Kasus 11 Jenis Tindak Pidana Pilihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Jam Kejadian Tahun 2014

No.	Jenis Tindak Pidana	Jumlah	06:00	09:00	12:00	15:00	18:00	21:00	00:00	02:00	04:00
			08:59	11:59	14:59	17:59	20:59	23:59	01:59	03:59	05:59
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
1.	Pembunuhan	4	2	-	-	-	1	-	-	-	1
2.	Penganiayaan Berat	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
3.	Pencurian dengan pemberatan	134	2	8	8	8	10	26	31	36	5
4.	Pencurian dengan kekerasan	65	3	10	14	7	5	4	10	6	6
5.	Pencurian Kendaraan Bermotor	218	15	8	16	56	64	32	12	10	5
6.	Kebakaran	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
7.	Perjudian	6	-	-	-	-	-	2	2	2	-
8.	Pemerasan/Ancam	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Perkosaan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10	Narkotika	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-
11	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provinsi NTB		437	23	26	38	72	83	67	57	54	17

Sumber : Polda NTB

Gambar 5.4 memperlihatkan jumlah jenis tindak pidana terhadap fisik manusia di Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2014. Terlihat bahwa jumlah penganiayaan ringan jumlahnya cukup banyak yang dilaporkan ke Polda NTB, yaitu sebanyak 929 kasus. Sedangkan perbuatan penganiayaan berat pada tahun 2014 dilaporkan ke Polda NTB sebanyak 86 kasus. Perbuatan lainnya yang dilaporkan adalah perkosaan sebanyak 40 kasus dan pembunuhan sebanyak 21 kasus.

Gambar 5.4. Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2014



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://ntb.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram NTB 83126
Telpon : (0370) 621385 Fax : (0370) 623801
Email : bps5200@bps.go.id
Website : <http://ntb.bps.go.id>